

PERANAN PEMBINA DATA

DALAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI KALIMANTAN TIMUR

DISAMPAIKAN PADA ACARA SOSIALISASI
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

- KHAIRIL ANWAR -

PRANATA KOMPUTER AHLI MADYA
KETUA TIM PEMBINAAN STATISTIK SEKTORAL

HIGH QUALITY DATA LEADS TO THE RIGHT POLICIE

Data untuk **Pengambilan Keputusan Yang Tepat**



**"SEKECIL APAPUN, GUNAKAN DATA
DALAM MENGAMBIL KEBIJAKAN"**

JOKO WIDODO, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Disampaikan pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) 2023, 17 Januari 2023

Sumber: <https://thefactory.com/news/gaining-wisdom-from-data/>



“ *Pembangunan yang berkualitas perlu didukung dengan data yang berkualitas dan terintegrasi* ”

Indonesia Emas 2045

Meningkatkan Kualitas Pembangunan

Pengambilan Keputusan dan Perumusan Kebijakan

Birokrasi Efisien
dan Akuntabel

Layanan
Pemerintah
Berkualitas dan
Mudah Diakses

Pembangunan
Daerah Adaptif
dan Tepat
Sasaran

Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Data Pemerintah Berkualitas dan Terintegrasi

Evidence-based Policy dalam Siklus Pembangunan

PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Sebagai dasar informasi dalam penyusunan rencana kebijakan pembangunan

PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

Sebagai panduan dalam pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

EVALUASI PEMBANGUNAN

Sebagai acuan dalam pengukuran efektivitas dan dampak dari pencapaian pembangunan

PENGENDALIAN PEMBANGUNAN

Sebagai panduan dalam penentuan batasan-batasan untuk menjamin ketercapaian pembangunan

PERAN STATISTIK DALAM REFORMASI BIROKRASI

RB GENERAL

Percepatan perbaikan sistem dan tata kelola pada IP, digitalisasi Birokrasi, dan Pembangunan Budaya BerAkhlaq

Data Statistik Berkualitas

Membangun proses bisnis statistik yang didukung dengan penguatan metodologi, penjaminan kualitas dan modernisasi TIK (SPBE) untuk menghasilkan data statistik berkualitas.

Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi dan validasi informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan Statistik Sektoral.

Hasil evaluasi akan ditunjukkan dengan Indeks Pembangunan Statistik (IPS) yang merupakan bagian dari penilaian RB.

RB TEMATIK

Percepatan penyelesaian isu prioritas pembangunan nasional/daerah yang dapat dirasakan oleh masyarakat

Mendukung penyelesaian isu-isu prioritas pemerintah

1

Pengentasan Kemiskinan

- ✓ Pendataan Awal **Registrasi Sosial Ekonomi** (Regsosek) dan pengelolaannya
- ✓ Pelaksanaan **survei untuk evaluasi** perkembangan penghapusan kemiskinan ekstrem

2

Peningkatan Investasi

- ✓ Sinkronisasi dan harmonisasi kode referensi antar K/L
- ✓ **Pengawasan** terhadap Pendataan Lengkap Koperasi dan UMKM

3

Digitalisasi Administrasi Pemerintahan

- ✓ Menyelenggarakan layanan manajemen data statistik dalam bentuk Sistem Infrastruktur Statistik Nasional yang berbagi pakai

4

Percepatan Prioritas Aktual Presiden

- ✓ **Pengendalian inflasi**: Penyediaan data dan insight kebijakan melalui kolaborasi hingga tingkat kab/kota
- ✓ **Penghitungan kontribusi P3DN terhadap PDB** melalui pengelolaan *big data* pengadaan barang/jasa pemerintah

SINERGI DALAM PENYELENGGARAAN STATISTIK



UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik
secara tegas membagi peran dan tugas penyelenggaraan statistik dasar, sektoral, dan khusus



Diperlukan Koordinasi dan Kolaborasi Bersama dalam Penyelenggaraan Kegiatan Statistik guna Menghasilkan Data Statistik yang Berkualitas



Peraturan Gubernur No 12 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral Pasal 3 :

Pembentukan Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :

1

Mewujudkan Sistem Statistik Daerah yang andal, efektif dan Efisien

- ✓ Penguatan sumber daya manusia
- ✓ Penggunaan teknologi informasi
- ✓ Kolaborasi dan koordinasi
- ✓ Pengawasan dan evaluasi
- ✓ Partisipasi masyarakat

2

Meningkatkan Koordinasi, integrasi dan harmonisasi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang statistik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah

- ✓ Koordinasi dalam penyelenggaraan statistik untuk mewujudkan sistem statistik yang konsisten, efisien, dan efektif

3

Menyediakan Data Statistik Sektoral yang berkualitas

- ✓ Menggunakan metodologi, konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran- ukuran statistik yang mengacu pada standar internasional

Peraturan Gubernur No 12 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral Pasal 8 :

Pembina Data sebagaimana dimaksud pasal 7 huruf a bertugas :

1

Memastikan pelaksanaan sistem pengelolaan data statistik terpadu;

Sistem pengelolaan data statistik terpadu bertujuan untuk mengintegrasikan data dari berbagai sektor dan instansi yang terkait, sehingga menghasilkan informasi yang akurat, konsisten, dan terpercaya untuk keperluan perencanaan, pengambilan keputusan, dan pemantauan kebijakan.

2

Melakukan koordinasi dan pembinaan mengenai penyelenggaraan Data yang menjadi kebutuhan internal Produsen Data dengan Walidata untuk mencegah duplikasi Data

- ✓ Koordinasi bersama-sama dengan Walidata dan Bappeda sebagai Sekretariat Satu data melakukan pembinaan dari terbentuknya Daftar Data hingga Data tersaji pada Portal Satu Data Kalimantan Timur

Upaya Pembinaan melalui Peningkatan Kapasitas Statistik

PENINGKATAN KAPASITAS STATISTIK



Kapasitas Institusi Statistik

- Penetapan unit kerja/fungsi yang menangani statistik
- Penerapan tata kelola data yang terintegrasi



Kapasitas Proses dan Metode Statistik

- Penerapan proses bisnis statistik yang berstandar -> GSBPM



Kapasitas SDM

- Penyiapan SDM di bidang Statistik dan Manajemen Data
- Penyelenggaraan diklat teknis statistik
- Penyediaan fungsional statistisi



Kapasitas Infrastruktur TI

- Dukungan infrastruktur TI terhadap penyelenggaraan kegiatan statistik



KUALITAS DATA

Relevansi

Akurasi

Aktualitas dan Tepat Waktu

Aksesibilitas

Koherensi dan Keterbandingan

Interoperabilitas

Penghimpunan Metadata Statistik Sektor

2022 Road Show ke OPD



- Roadshow ke OPD 2022 dilaksanakan pada 18 OPD terpilih dengan membentuk 6 tim melibatkan BPS, Bappeda dan Diskominfo.
- Roadshow ke OPD adalah upaya perbaikan kualitas data dari hulu.
- Dalam roadshow, tim akan melakukan pendampingan kepada OPD untuk menentukan metadata dan standar data pada metadata variabel, indikator maupun kegiatan yang tercantum dalam daftar data yang dikeluarkan oleh Forum Satu Data.

Penghimpunan Metadata Statistik Sektoral

2023

Coaching Statistik Sektoral

Coaching Clinic Statistik Sektoral telah dilaksanakan kepada seluruh OPD dan Biro (45 OPD dan Biro) melalui 3 Batch Coaching dengan masing-masing Batch terdiri dari 3 Desk dan masing-masing Desk terdapat 5 OPD/Biro.

Dalam Coaching Statistik Sektoral telah diajarkan :

1. Proses tahapan penyelenggaraan kegiatan statistik baik survei maupun kompilasi produk administrasi masing-masing instansi dari perencanaan, pengumpulan data, pemeriksaan data dan penyebarluasan data.
2. Penghimpunan metadata kegiatan, metadata variabel dan metadata indikator.



Pelaksanaan Kegiatan Statistik Sektoral 2022

Pada tahun 2022 dengan menghasilkan 12 Rekomendasi Kegiatan Statistik berasal dari 6 OPD sebagai berikut :

- 1.Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur (1 Rekomendasi)
- 2.Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur (2 Rekomendasi)
- 3.Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur (6 Rekomendasi)
- 4.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur (1 Rekomendasi)
- 5.Dinas Perkebunan (1 Rekomendasi - Kegiatan Berulang)
- 6.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (1 Rekomendasi - Kegiatan Berulang)

Metadata Kegiatan Statistik Tahun 2022 sudah dilakukan verifikasi dan disetujui sebanyak 16 OPD sebagai berikut :

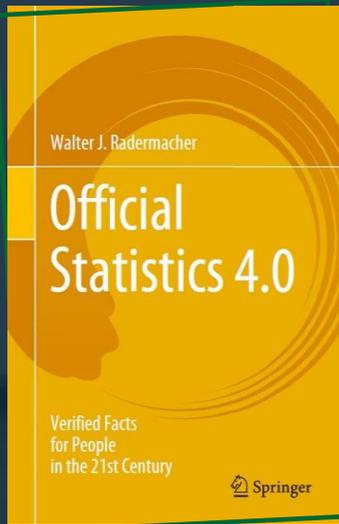
- | | |
|---|----------------------|
| 1.BKD | 9.Dinas ESDM |
| 2.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah | 10.Dinas PUPR |
| 3.Dinas Pemuda dan Olahraga | 11.Dinas Kominfo |
| 4.DPMPTSP | 12.Dinas Pariwisata |
| 5.Dinas Kelautan dan Perikanan | 13.Badan Kesbangpol |
| 6.Dinas Peternakan | 14.DKP3A |
| 7.Dinas Perkebunan | 15.DPMPD |
| 8.Dinas Kesehatan | 16.Dinas Perhubungan |

Pelaksanaan Kegiatan Statistik Sektoral 2023

Pada tahun 2023 hingga bulan Juli telah menghasilkan 23 Rekomendasi Kegiatan Statistik berasal dari 17 OPD sebagai berikut :

1. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur (1 Rekomendasi)
2. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur (2 Rekomendasi)
3. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur (1 Rekomendasi)
4. Dinas PU, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur (3 Rekomendasi)
5. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur (1 Rekomendasi)
6. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur (2 Rekomendasi)
7. Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur (1 Rekomendasi)
8. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Kalimantan Timur (1 Rekomendasi)
9. Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Kalimantan Timur (1 Rekomendasi)
10. Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan (4 Rekomendasi)
11. Dinas Pemuda dan Olahraga (1 Rekomendasi)
12. Dinas Komunikasi dan Informatika (1 Rekomendasi)
13. Satpol PP (1 Rekomendasi)
14. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur (1 Rekomendasi)
15. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR (1 Rekomendasi)
16. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (1 Rekomendasi)

MENGENAL OFFICIAL STATISTICS



Official Statistics



Memenuhi prinsip-prinsip dasar:
UN Fundamental Principles of
Official Statistics



Menggunakan metodologi dan
proses bisnis yang standar
sehingga memiliki
keterbandingan secara
internasional dan kualitas yang
terjaga



Dihasilkan melalui Sistem
Statistik Nasional dan
diverifikasi oleh kantor statistik
negara.

Contoh Official Statistics



Pertumbuhan
Ekonomi



Pengangguran



Kemiskinan &
Ketimpangan



Inflasi



Indeks
Pembangunan
Manusia



Prevalensi
Stunting

... dan lainlain

BAGAIMANA OFFICIAL STATISTICS DIHASILKAN?



Cara Pengumpulan Data

UU Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik

Sensus

Sensus diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam 10 (sepuluh).

Contoh: Sensus Penduduk, **Sensus Pertanian**, dan Sensus Ekonomi

Survei

Survei diselenggarakan secara berkala dan sewaktu-waktu untuk memperoleh data yang rinci.

Contoh: Susenas, Sakernas, Survei Penduduk Antar Sensus

Kompilasi Produk Administrasi

Kompilasi produk administrasi dilaksanakan dengan memanfaatkan berbagai dokumen produk administrasi.

Contoh: Profil penduduk berdasarkan data Dukcapil

Cara Lain

Cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Contoh: Pemanfaatan **Big Data**

Statistik Dasar atau *Official Statistics* Terjaga Kualitasnya



Melalui tahapan penyelenggaraan yang standar

The Generic Statistical Business Process Model (GSBPM)



Merujuk pada manual yang standar

PDB/PDRB

1. **System of National Accounts 2008** (UNSD)
2. **Quarterly National Accounts Manual 2017** (IMF)

Inflasi

Consumer Price Index Manual 2020
(IMF, ILO, Eurostat, UNECE, OECD, dan World Bank)

Kemiskinan

Handbook on Poverty and Inequality (World Bank)



Diawasi dan dipantau oleh banyak pihak

- ✓ **Forum Masyarakat Statistik (FMS)** (UU No. 16 Tahun 1997 Pasal 29)
- ✓ **Lembaga Internasional** (dilaporkan di sidang tahunan Komisi Statistik PBB)

TUGAS & TANGGUNG JAWAB BPS



Kegiatan statistik adalah tindakan yang meliputi upaya penyediaan dan penyebarluasan data, upaya pengembangan ilmu statistik, dan upaya yang mengarah pada berkembangnya Sistem Statistik Nasional

- UU No. 16 Tahun 1997 tentang Statist-ik

Poin-Poin Penting dalam UU No. 16 Tahun 1997



Badan Pusat Statistik BPS sebagai pembina data statistik BPS sebagai pembina data statistik melakukan pembinaan terhadap penyelenggara kegiatan statistik baik di tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kontribusi dan apresiasi masyarakat terhadap statistik, mengembangkan Sistem Statistik Nasional (SSN), dan mendukung pembangunan nasional/Daerah



Badan Pusat Statistik sebagai pusat rujukan statistik BPS selaku inisiator dalam koordinasi dan kerjasama serta pembinaan statistik. Dalam upaya memenuhi asas keterpaduan, keakuratan, dan kemitakhiran data dalam kegiatan statistik perlu diatur mekanisme penyelenggaraan statistik.



Badan Pusat Statistik melakukan Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, dan Standardisasi (KISS) BPS melakukan Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, dan Standardisasi (KISS) dengan seluruh penyelenggara kegiatan statistik dalam mewujudkan Sistem Statistik Nasional.

SISTEM STATISTIK NASIONAL



Sistem Statistik Nasional (SSN) adalah suatu tatanan yang terdiri atas unsur-unsur kebutuhan data statistik, sumber daya, metode, sarana dan prasarana, ilmu pengetahuan dan teknologi, perangkat hukum, serta masukan dari Forum Masyarakat Statistik (FMS).

- Keputusan Kepala BPS Nomor 5 Tahun 2000 tentang Sistem Statistik Nasional-



SSN mengandung arti bahwa statistik bukan hanya dilakukan oleh atau menjadi domain BPS semata, tetapi juga milik semua pihak. Semua pihak diharapkan mampu menyelenggarakan statistik.

Tujuan Sistem Statistik Nasional



Penyelenggara kegiatan statistik memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal



Menghindari kemungkinan terjadinya duplikasi kegiatan oleh para penyelenggara kegiatan statistik



Terciptanya sistem yang andal, efektif, dan efisien

TENTANG KUALITAS

Quality is User Satisfaction

Quality is Fits the user's need

4

ABSOLUTES

(PRINSIP MUTLAK) TENTANG KUALITAS

-- Philip B. Crosby



1

Definisi kualitas adalah kesesuaian dengan persyaratan (produk atau tuntutan pelanggan)

2

Sistem mutu adalah pencegahan, bukan sekedar pemeriksaan atau penilaian

3

Standar performa adalah zero defects (relatif terhadap persyaratan)

4

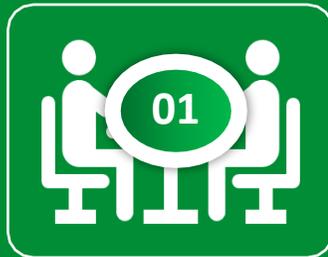
Pengukuran kualitas adalah harga ketidaksesuaian, bukan indeks

PENJAMINAN KUALITAS

“Serangkaian aksi yang terencana dan sistematis untuk memberikan keyakinan bahwa sebuah produk sesuai dengan kebutuhan pengguna”

UN NQAF (2019)

Pentingnya penjaminan
kualitas statistik



Meningkatkan keyakinan dan kepercayaan para pengguna data terhadap data dan informasi yang dihasilkan Produsen Data

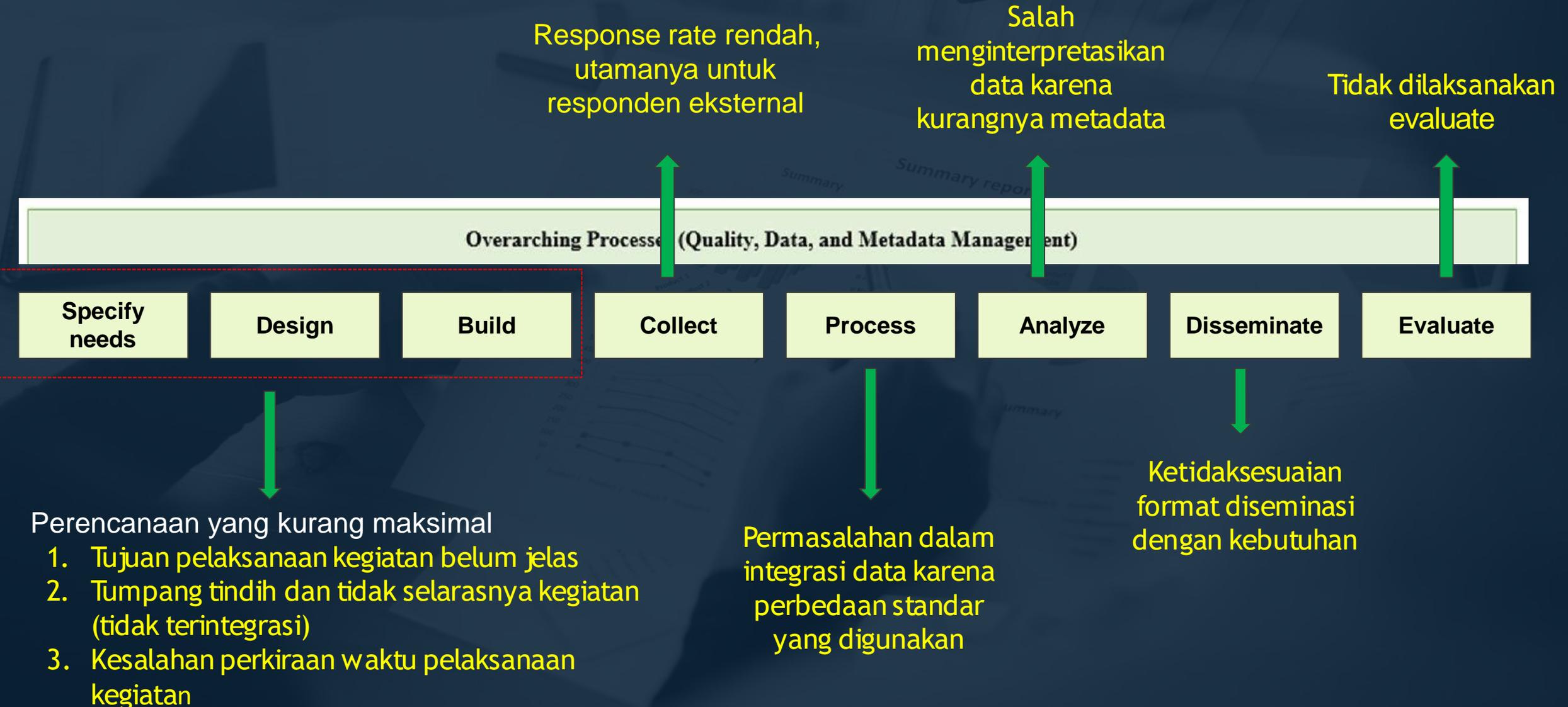


Meningkatkan kualitas data dan informasi yang dihasilkan



Menjaga kredibilitas organisasi

ISU KUALITAS PADA PELAKSANAAN KEGIATAN STATISTIK



QUALITY GATES DALAM PENJAMINAN KUALITAS DATA



Sekilas Quality Gates

Quality Gates adalah strategi mitigasi risiko organisasi untuk meningkatkan deteksi dini terhadap *ERROR* yang terjadi pada proses statistik



Tujuan dan Manfaat Quality Gates

- Memastikan kualitas proses statistik yang sedang berjalan dengan mitigasi risiko sedini mungkin
- Meningkatkan penjaminan kualitas *output* statistik yang dihasilkan
- Akuntabilitas dan pertanggungjawaban proses statistik
- Bahan evaluasi, monitoring, dan perencanaan pembangunan kualitas statistik

Reformasi
Birokrasi

Satu Data
Indonesia

Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS)

Sistem
Statistik
Nasional

*verifikasi dan validasi penilaian
mandiri K/L/Pemda untuk
mengukur tingkat kematangan
penyelenggaraan statistik
sektoral*

Peraturan BPS Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Tujuan

- Mengukur capaian kemajuan penyelenggaraan Statistik Sektoral
- Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Statistik Sektoral
- Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang statistik

21 Maret 2023

Kick Off Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral 2023





Terima Kasih!

www.kaltim.bps.go.id

